

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
BANTUR KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

**RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Bantur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

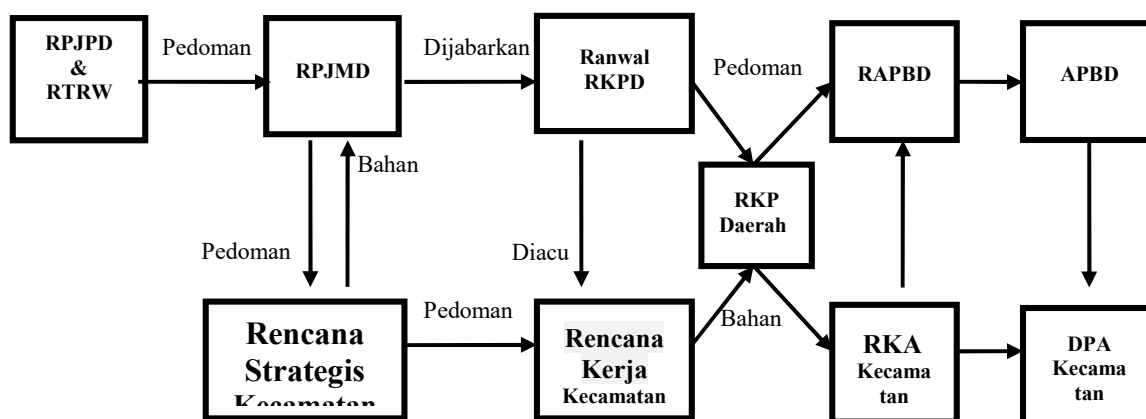
Proses Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 Nomor: 050/601/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Agustus 2018 Nomor: 050/5012/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Kecamatan Bantur Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Bantur selaku Perangkat Daerah juga

berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantur. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Bantur berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2019 ini, akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bantur tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan

selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bantur untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Bantur berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bantur Tahun 2019 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR TAHUN 2017

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bantur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantur
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANTUR.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bantur
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTUR

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR
TAHUN 2017

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Rencana Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Kecamatan Bantur melaksanakan 7 program dan 19 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2018 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d tahun 2018
Kecamatan Bantur

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Rencana Strategis PD)	Realisa si target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n kegiata n s/d tahun 2016 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (tahun lalu / n - 2)			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD tahun berjalan (Tahun 2018) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)	
					Target Rencana Kerja SKPD Tahun 2017	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capa ian
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar (buah)	5.250 Buah	1.000 Surat	875 Buah	875 Buah	100%	875 Buah	1.750 Buah	*
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	72 Bulan	12 Rekenin g	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	*
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	72 Bulan	12 Orang	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	36 Bulan	*

1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan (HOK)	26.800 Kotak	20.100 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	100%	3.350 Kotak	26.800 Kotak	100%
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat – alat listrik dan Elektronik (Jenis)	10 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	10 Jenis	100%
1.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan Dinas Kedalam Daerah (HOK)	78 Orang	500 HOK	13 Orang	13 Orang	100%	13 Orang	26 Orang	*
1.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus (Unit)	30 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30 Unit	100%
1.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	72 Bulan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	*
2	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	100%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		1 Paket	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	0 Paket	*

2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin dan Berkala (Jenis)	1 Jenis	1 Unit	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	*
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara Rutin dan berkala (Unit)	30 unit	10 Unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	30 unit	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	49 Stel	14 Stel	19 Stel	19 Stel	100%	16 Stel	49 Stel	100%
3.2	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)		0 Stel	19 Stel	19 Stel	100%	0 Stel	19 Stel	*
3.3	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga / Batik (Stel)	49 Stel	14 Stel	19 Stel	19 Stel	100%	16 Stel	49 Stel	100%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan (Orang)	48 Orang	0 Orang	24 Orang	24 Orang	100%	24 Orang	48 Orang	100%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	21 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	21 Dokumen	100%

6	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Fasilitasi)	90 Fasilitasi	4 Kali	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	100%	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	*
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD (Fasilitasi)	72 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	-	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	100%
		2. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Fasilitasi)	60 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	-	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	100%
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Fasilitasi)	144 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	0 Fasilitasi	-	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	100%
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	300 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100%
		2. Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	3 Kali Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses (Berkas)	10.050 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	100%	3.350 Berkas	3.350 Berkas	100%

		2. Jumlah Fasilitas Pelayanan Terpadu Kecamatan (Kali)	30 Kali	0 Berkas	0 Kali	0 Kali	-	10 Kali	10 Kali	100%
--	--	--	---------	----------	--------	--------	---	---------	---------	------

Catatan :

*Karena ada perbedaan Indikator dan Target Kinerja setelah adanya Revisi RPJMD/ Rencana Strategis sehingga tidak diakumulasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Bantur, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Bantur dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantur tahun 2018 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Bantur yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Bantur, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021 sesuai Perubahan Rencana Strategis terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bululawang ;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantur dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Rencana Strategis PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi tahun ke -		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam		49%	90%	90%	-	-	100%	100%	-	-	1. Berdasarkan Perubahan / Reviu RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis 2. Digunakan sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Tahun 2016 sampai dengan 2018
2.	Persentase kelancaran proses administrasi kependudukan : a. KTP b. KK c. Pindah Tempat			100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	- - -	- - -	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	- - -	- - -	1. Berdasarkan Perubahan / Reviu RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis 2. Digunakan sebagai indikator Kinerja

												Utama (IKU) Kec. Tahun 2016 sampai dengan 2018
3.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			93%	96%	-	-	100%	100%	-	-	Digunakan sebagai indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Tahun 2016 sampai dengan 2018
4.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.			-	-	80%	83%	-	-	80%	83%	IKU digunakan mulai tahun 2019 sampai dengan 2021
5.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	-	76%	78%	-	-	76%	78%	
Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Bantur												
I.	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
I.1	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar (buah)			875 Buah	875 Buah	875 Buah	875 Buah	875 Buah	875 Buah	875 Buah	875 Buah	
I.2	Jumlah Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
I.3	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
I.4	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
I.5	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
I.6	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan (HOK)			3.350 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	
I.7	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat listrik dan Elektronik (Jenis)			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	

I.8	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan Dinas Kedalam Daerah (HOK)			13 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	
I.9	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus (Unit)			10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	
I.10	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
II. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
II.1	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
II.2	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara			0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	
II.3	Jumlah Gedung Kantor yang dipeliharakan Rutin dan Berkala (Jenis)			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
II.1	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara Rutin dan berkala (Unit)			10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
III. Persentase Penunjang Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
III.1	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	
III.2	Jumlah Penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)			19 Stel	0 Stel	0 Stel	0 Stel	19 Stel	0 Stel	0 Stel	0 Stel	
III.3	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga / Batik (Stel)			19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	
IV. Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)												
IV.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan (Orang)			24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	
V. Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
V.1	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Dokumen)			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
VI. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan				-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

VI.1	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Fasilitasi)			12 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	12 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	
VI.2	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD (Fasilitasi)			-	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	-	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	
	2. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Fasilitasi)			-	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	-	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	
VI.3	Jumlah Kegiatan pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Fasilitasi)			-	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	-	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	
VI.4	1. Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)			-	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	-	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	
	2. Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
VI.5	1. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses (Berkas)			-	3.350 Berkas	3.350 Berkas	3.350 Berkas	-	3.350 Berkas	3.350 Berkas	3.350 Berkas	
	2. Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Kali)			-	10 Kali	10 Kali	10 Kali	-	10 Kali	10 Kali	10 Kali	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bantur

Permasalahan yang ada Kecamatan Bantur dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai ;
- b. Etos Kerja yang belum terbina secara Optimal ;
- c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan ;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bantur secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Bantur tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

- a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bantur dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Bantur, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
 - b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
 - c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 1. Adanya SPPT ganda;
 - 2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir

menerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam

peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat :

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayannya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan uraian hasil Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

REVIU Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Sesuai dengan Rancangan RKPD Akhir)					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bantur	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	276.035.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bantur	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	276.035.000,00	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bantur	Jumlah Register Surat Masuk dan Surat Keluar (buah)	875 Buah	7.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bantur	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	875 Buah	7.200.000,00	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bantur	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum / Air Bersih, Telekomunikasi (Bulan)	12 Bulan	7.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bantur	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	7.800.000,00	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Bantur	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (Bulan)	12 Bulan	67.200.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Bantur	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	67.200.000,00	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	39.385.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	39.385.000,00	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bantur	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Paket)	1 Paket	9.950.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bantur	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	1 Paket	9.950.000,00	
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bantur	Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu	3.350 Kotak	45.560.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bantur	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan	3350 Kotak	45.560.000,00	

			yang disediakan (HOK)					tamu yang disediakan (HOK)			
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah Penyediaan Komponen alat - alat listrik dan Elektronik (Jenis)	5 Jenis	6.295.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	6.295.000,00	
1.8	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Bantur	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas Kedalam Daerah (HOK)	13 Orang	85.145.000,00	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Bantur	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	13 Orang	85.145.000,00	
1.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Bantur	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (Unit)	10 Unit	2.700.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Bantur	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	10 Unit	2.700.000,00	
1.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	12 Bulan	4.800.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 Bulan	4.800.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Bantur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100 %	118.260.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Bantur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	118.260.000,00	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	3 Jenis	38.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 Jenis	38.000.000,00	
2.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	1 Unit	65.260.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Bantur	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	65.260.000,00	
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Bantur	Jumah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	10 Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang	10 Unit	15.000.000,00	

								dipelihara rutin dan berkala (Unit)			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Bantur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100 %	16.890.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Bantur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	16.890.000,00	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kecamatan Bantur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	16 Stel	6.650.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kecamatan Bantur	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	16 Stel	6.650.000,00	
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu	Kecamatan Bantur	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	16 Stel	10.240.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu	Kecamatan Bantur	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	16 Stel	10.240.000,00	
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	Kecamatan Bantur	Persentase peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	7.200.000,00	Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	Kecamatan Bantur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7.200.000,00	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Bantur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan (Orang)	24 Orang	7.200.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Bantur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	24 Orang	7.200.000,00	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Bantur	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	8.490.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Bantur	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	8.490.000,00	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bantur	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	7 Dokumen	8.490.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bantur	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 Dokumen	8.490.000,00	

6	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Bantur	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100 %	88.125.000,00	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Bantur	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	209.125.000,00	
6.1	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Bantur	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	30 Fasilitasi	37.350.000,00	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Bantur	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	30 Fasilitasi	88.633.500,00	
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Kecamatan Bantur	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	24 Fasilitasi	9.000.000,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Kecamatan Bantur	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20 Fasilitasi	21.357.500,00	
		Kecamatan Bantur	2. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	20 Fasilitasi	9.000.000,00		Kecamatan Bantur	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	24 Fasilitasi	21.357.500,00	
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Bantur	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Fasilitasi	10.000.000,00	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Bantur	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Fasilitasi	23.730.500,00	
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bantur	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	100 Kegiatan	15.000.000,00	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bantur	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Kegiatan	35.595.800,00	

		Kecamatan Bantur	2. Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	3.770.000,00		Kecamatan Bantur	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	8.946.000,00	
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Bantur	1. Jumlah Fasilitas Pelayanan Terpadu Kecamatan	3.350 Berkas	3.505.000,00		Kecamatan Bantur	Jumlah Fasilitas Pelayanan Terpadu Kecamatan	10 Kali	1.186.600,00	
			2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	10 Kali	500.000,00		Kecamatan Bantur	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	3350 Berkas	8.317.600,00	
Jumlah Program : 6 Kegiatan : 23						515.000.000,00				636.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantur sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Bantur sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bantur

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan

dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang ***MADEP MANTEB MANETEP***” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”*** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu ***“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”***, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bantur adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

b. Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Kecamatan Bantur melaksanakan 6 program dan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan makanan dan minuman ;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- h. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional ;
- j. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas.

3. Program peningkatan Disiplin Aparatur :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya ;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.

4. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan ;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05.4.05.7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bantur	100%	276.035.000,00	APBD		100%	276.035.000,00
4.05.4.05.7.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Bantur	875 Buah	7.200.000,00	APBD		875 Buah	7.200.000,00
4.05.4.05.7.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	7.800.000,00	APBD		12 Bulan	7.800.000,00
4.05.4.05.7.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	67.200.000,00	APBD		12 Bulan	67.200.000,00

4.05.4.05.7.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Bantur	1 Paket	39.385.000,00	APBD		1 Paket	39.385.000,00
4.05.4.05.7.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Bantur	1 Paket	9.950.000,00	APBD		1 Paket	9.950.000,00
4.05.4.05.7.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Bantur	3350 Kotak	45.560.000,00	APBD		3350 Kotak	45.560.000,00
4.05.4.05.7.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Bantur	5 Jenis	6.295.000,00	APBD		5 Jenis	6.295.000,00
4.05.4.05.7.01.18	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Bantur	13 Orang	85.145.000,00	APBD		13 Orang	85.145.000,00
4.05.4.05.7.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Bantur	10 Unit	2.700.000,00	APBD		10 Unit	2.700.000,00

4.05.4.05.7.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	4.800.000,00	APBD		12 Bulan	4.800.000,00
4.05.4.05.7.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kecamatan Bantur	100%	118.260.000,00	APBD		100%	118.260.000,00
4.05.4.05.7.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kecamatan Bantur	3 Jenis	38.000.000,00	APBD		3 Jenis	38.000.000,00
4.05.4.05.7.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin / berkala	Kecamatan Bantur	1 Jenis	65.260.000,00	APBD		1 Jenis	65.260.000,00
4.05.4.05.7.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Kendaraan Roda dua yang dipelihara rutin / berkala	Kecamatan Bantur	10 Unit	15.000.000,00	APBD		10 Unit	15.000.000,00
4.05.4.05.7.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kecamatan Bantur	100%	16.890.000,00	APBD		100%	16.890.000,00

4.05.4.05.7.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Bantur	16 Stel	6.650.000,00	APBD		16 Stel	6.650.000,00
4.05.4.05.7.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Bantur	16 Stel	10.240.000,00	APBD		16 Stel	10.240.000,00
4.05.4.05.7.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kecamatan Bantur	100%	7.200.000,00	APBD		100%	7.200.000,00
4.05.4.05.7.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Bantur	24 Orang	7.200.000,00	APBD		24 Orang	7.200.000,00
4.05.4.05.7.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kecamatan Bantur	100%	8.490.000,00	APBD		100%	8.490.000,00

4.05.4.05.7.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Bantur	7 Dokumen	8.490.000,00	APBD		7 Dokumen	8.490.000,00
4.405.65.01	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Bantur	100%	209.125.000,00	APBD		100%	209.125.000,00
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Bantur	30 Fasilitasi	88.633.500,00	APBD		30 Fasilitasi	88.633.500,00
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kecamatan Bantur	20 Fasilitasi	21.357.500,00	APBD		20 Fasilitasi	21.357.500,00
		2. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	Kecamatan Bantur	24 Fasilitasi	21.357.500,00	APBD		24 Fasilitasi	21.357.500,00
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Bantur	48 Fasilitasi	23.730.500,00	APBD		48 Fasilitasi	23.730.500,00

	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bantur	100 Kegiatan	35.595.800,00	APBD		100 Kegiatan	35.595.800,00
		2. Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Bantur	1 Kegiatan	8.946.000,00	APBD		1 Kegiatan	8.946.000,00
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1. Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Bantur	10 Kali	1.186.600,00	APBD		10 Kali	1.186.600,00
		2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	Kecamatan Bantur	3350 Berkas	8.317.600,00	APBD		3350 Berkas	8.317.600,00
	Jumlah				636.000.000,00				636.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTUR

Rencana Kerja Kecamatan Bantur serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp7.200.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.200.000,- ;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp7.800.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.800.000,- ;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp67.200.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp67.200.000,-;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp39.385,000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp39.385.000,- ;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan Anggaran sebesar Rp9.950.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.950.000,- ;
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan Anggaran sebesar Rp45.560.000,- dan hasil analisis sebesar Rp45.560.000,- ;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan Anggaran sebesar Rp6.295.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp6.295.000,- ;
- h. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp85.145.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp85.145.000,-
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp2.700.000,- dan

hasil analisis kebutuhan sebesar Rp2.700.000,- ;

- j. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp4.800.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.800.000,- ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp38.000.000,- dan hasil analisis dan terealisasi sebesar Rp38.000.000,- ;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp65.260.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp65.260.000,- ;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dialokasikan sebesar Rp15.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.000.000,- ;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dialokasikan Anggaran sebesar Rp6.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp6.650.000,-
- b. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu dialokasikan Anggaran sebesar Rp10.240.000,- dan hasil Analisis kebutuhan sebesar Rp10.240.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasikan Anggaran sebesar Rp7.200.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.200.000,- ;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp8.490.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp8.490.000,- ;

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan sebesar Rp88.633.500,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp88.633.500,- ;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp42.715.000,- dari analisis

- kebutuhan ditetapkan anggaran sebesar Rp42.715.000;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp23.730.500,- dari analisis kebutuhan ditetapkan anggaran sebesar Rp23.730.500,- ;
 - d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp44.541.800,- dari analisis kebutuhan ditetapkan anggaran sebesar Rp44.541.800,- ;
 - e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp9.504.200,- dari analisis kebutuhan ditetapkan anggaran sebesar Rp9.504200,- .

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Bantur Tahun 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bantur	100%	276.035.000,00	APBD	
I.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Bantur	875 Buah	7.200.000,00	APBD	
I.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	7.800.000,00	APBD	
I.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	67.200.000,00	APBD	
I.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Bantur	1 Paket	39.385.000,00	APBD	

I.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Bantur	1 Paket	9.950.000,00	APBD	
I.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Bantur	3350 Kotak	45.560.000,00	APBD	
I.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Bantur	5 Jenis	6.295.000,00	APBD	
I.8	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Bantur	13 Orang	85.145.000,00	APBD	
I.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kecamatan Bantur	10 Unit	2.700.000,00	APBD	
I.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	4.800.000,00	APBD	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kecamatan Bantur	100%	118.260.000,00	APBD	
II.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kecamatan Bantur	3 Jenis	38.000.000,00	APBD	
II.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin / berkala	Kecamatan Bantur	1 Jenis	65.260.000,00	APBD	

II.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Kendaraan Roda dua yang dipelihara rutin / berkala	Kecamatan Bantur	10 Unit	15.000.000,00	APBD	
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	Kecamatan Bantur	100%	16.890.000,00	APBD	
III.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Bantur	16 Stel	6.650.000,00	APBD	
III.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Bantur	16 Stel	10.240.000,00	APBD	
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	Kecamatan Bantur	100%	7.200.000,00	APBD	
IV.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Bantur	24 Orang	7.200.000,00	APBD	
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Kecamatan Bantur	100%	8.490.000,00	APBD	
V.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Bantur	7 Dokumen	8.490.000,00	APBD	
VI.2	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan Bantur	100%	209.125.000,00	APBD	

VI.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Bantur	30 Fasilitasi	88.633.500,00	APBD	
VI.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kecamatan Bantur	20 Fasilitasi	21.357.500,00	APBD	
		2. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	Kecamatan Bantur	24 Fasilitasi	21.357.500,00	APBD	
VI.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Bantur	48 Fasilitasi	23.730.500,00	APBD	
VI.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bantur	100 Kegiatan	35.595.800,00	APBD	
		2. Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Bantur	1 Kegiatan	8.946.000,00	APBD	
VI.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1. Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Bantur	10 Kali	1.186.600,00	APBD	
		2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	Kecamatan Bantur	3350 Berkas	8.317.600,00	APBD	
Jumlah					636.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.

Pada Tahun 2019, Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ini terdapat 6 program dan 23 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rancangan Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2019, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100$
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} = \text{-----} \times 100 \%$
Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} = \text{-----} \times 100 \%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100$	83,00	83,61	84,00	84,61	85,00
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} = \text{-----} \times 100 \%$	0	0	80 %	85 %	85 %